

RENCANA KINERJA

BAPPEDA KOTA JAMBI 2015

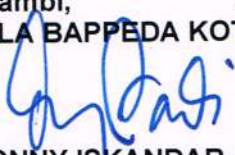
Pemerintah Kota Jambi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2014



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) Tahun 2015 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi. Guna mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Yang Handal, Terpercaya Dan Profesional.

Jambi, 2014
KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI

DR. DONNY ISKANDAR, S.Sos, MT
NIP.19691125 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
 BAB II EVALUASI KINEJA BAPPEDA TAHUN 2013	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi	18
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	26
3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2015	27
 BAB IV PENUTUP	37

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) Tahun 2015 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi. Guna mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Yang Handal, Terpercaya Dan Profesional.

Jambi, 2014
KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI


DR. DONNY ISKANDAR, S.Sos, MT
NIP.19691125 199703 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Proses

Penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada

1.2. Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 08)
10. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Jambi tahun 2009 Nomor 13)
11. Peraturan Daerah Jambi Nomor. 08 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

Tujuan sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang pedoman pada RKPD Kota Jambi

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015
Berisikan penjelasan mengenai program kegiatan Tahun 2015

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI KINERJA BAPPEDA 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013

Bappeda Kota Jambi pada tahun 2013 telah melaksanakan 8 (delapan) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis

1. Program Pengembangan Data/Informasi

- a. Kegiatan Penyusunan Pemutakhiran Database Kepegawaian Bappeda Kota Jambi Berbasis IT

Indikator Output kegiatan adalah : Hardcopy dan softcopy data base kepegawaian Bappeda Kota Jambi tahun 2013.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

- b. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya buku Database Perencanaan dan buku Jambi Dalam Angka

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya koordinasi dalam perencanaan penanganan perumahan di Kota Jambi dengan terbentuknya Tim Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kota Jambi, terutama koordinasi ke Kementerian Perumahan Rakyat RI di Jakarta terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program Pembangunan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK TA. 2013).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis Renstra SKPD

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya buku Rancangan RPJM 2013-2018 dan Rancangan Indikator Kinerja Daerah 2013-2018

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

b. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya buku LKPJ tahun 2012, Summary LKPJ tahun 2012, LKPJ Akhir Jabatan dan Summary LKPJ Akhir Jabatan

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya buku Ev. & Pengendalian, buku Evaluasi DAK dan Evaluasi Tugas Pembantuan.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

d. Kegiatan Penyusunan Naskah dan Materi Pidato

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya buku Naskah Pidato Walikota Jambi dan buku Kumpulan Naskah Pidato Walikota Jambi Tahun 2012 serta buku HUT Kota.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD

Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya kegiatan Musrenbangda dan tersedianya buku RKPD

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

b. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Anggaran Pemerintah Daerah

Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya proses penetapan Kebijakan dan Anggaran Pemerintah Daerah

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya rakor urusan pemerintahan umum

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

d. Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

Indikator Output kegiatan adalah : Adanya penelitian dan pengembangan serta sistem inovasi daerah Kota Jambi

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

e. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Output kegiatan adalah : Tersusunnya buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi Simpeda Serta Aplikasi Simpeda

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

f. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya buku Analisa Standar Belanja Sebagai Pedoman Untuk Penyusun Pagu Anggaran kegiatan SKPD di Kota Jambi

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

g. Kegiatan Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Jambi

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya informasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD pengampu SPM Kota Jambi

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi

Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya Rakor Bidang Ekonomi, RKPPMD, Forum Pengembangan Ekonomi Daerah, Forum Inflasi Daerah Kota Jambi Tahun 2013

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

- b. Kegiatan Koordinasi Pertanian dan Ketahanan Pangan
Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya Rapat tentang Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan,
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- c. Kegiatan Koordinasi Promosi Produk Unggulan Daerah
Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya Rapat Tim Koordinasi Promosi Produk Unggulan Daerah
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- d. Kegiatan Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi
Indikator Output kegiatan adalah : Tersusunnya buku hasil studi potensi PAD Kota Jambi tahun 2013.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

6. Program Perencanaan Sosial Budaya

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan
Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Jambi
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan SDM
Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan SDM
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- c. Kegiatan Koordinasi Program SAMISAKE
Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya Koordinasi Program SAMISAKE
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Fispra

Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Fispra dan SDA Kota Jambi
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

8. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Kota Jambi terkait pengendalian pemanfaatan ruang kota Jambi.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

b. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Materi Teknis RT/RW dan Ranperda

Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya Jasa konsultan perorangan selama 4 (empat) bulan dengan kualifikasi keahlian planologi sebanyak 1 (satu) orang, dan Jasa praktisi hukum (akademisi) sebagai nara sumber sebanyak 1 (satu) orang.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

Tabel. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI						
	1 Kegiatan Penyusunan Pemutakhiran Database Kepegawaian Bappeda Kota Jambi Berbasis IT	34,225,000	26,011,000	76.00%	Hardcopy dan softcopy data base kepegawaian Bappeda Kota Jambi tahun 2013	Tersedianya data kepegawaian Bappeda Kota Jambi berbasis IT	
	2 Kegiatan Penyusunan Profil Daerah	150,050,000	140,581,850	93.69%	• 50 buku database perencanaan • 100 buku Jambi Dalam Angka	Tersedianya buku database perencanaan dan buku Jambi Dalam Angka	
2	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR						
	1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan	487,451,500	467,222,250	95.85%	Terlaksananya koordinasi dalam perencanaan penanganan perumahan di Kota Jambi dengan terbentuknya Tim Koordinasi Penanganan Perumahan Kota Jambi, terutama koordinasi ke Kementerian Perumahan Rakyat RI di Jakarta terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program Pembangunan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK TA. 2013).	Terciptanya koordinasi dalam penanganan perumahan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Terlaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi (Bappeda Provinsi Jambi dan Dinas PU Provinsi Jambi Bidang Perumahan) dalam hal mengidentifikasi penangan Perumahan Permukiman Kumuh dan penyusunan perencanaan penangan perumahan kumuh dan sanitasi provinsi Jambi.		
					Terlaksanakan koordinasi dengan lembaga Swadaya masyarakat (LSM) terkait, developer, Perumnas dan Pihak terkait lainnya dalam urusan perumahan.		
					Terlaksananya Koordinasi Percepatan Pembangunan Jambi Kota Seberang		
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	1 Kegiatan Bimbingan Teknis Renstra SKPD	93,392,000	92,402,000	98.94%	Terlaksananya Bintel sebanyak 100 orang	Meningkatkan Kapasitas dan Pengetahuan Aparatur yang memahami RENSTRA	
4	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	1 Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD	254,250,000	155,092,500	61.00%	Tersusunnya buku rancangan RPJM 2013-2018 dan rancangan indikator kinerja daerah 2013-2018	Tersedianya buku rancangan RPJM 2013-2018 dan rancangan indikator kinerja daerah 2013-2018	
	2 Keterangan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPIJ)	298,675,000	292,492,400	97.93%	Tersusun nya buku LKPJ tahun 2012, sumary LKPJ tahun 2012, LKPJ akhir jabatan dan sumary LKPJ akhir jabatan	Tersedia nya buku LKPJ tahun 2012, sumary LKPJ tahun 2012, LKPJ akhir jabatan dan sumary LKPJ akhir jabatan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah	92,025,000	71,650,650	77.86%	Tersusun nya buku Ev. & Pengendalian, buku Evaluasi DAK dan evaluasi tugas pembantuan.	Tersedia nya buku Ev. & Pengendalian, buku Evaluasi DAK dan evaluasi tugas pembantuan.	Pengiriman laporan RFK, Bangda, DAK, & TP sering terlambat dari PPTK dan Belum menggunakan format sesuai Permendagri No.54 thn 2010.
4	Kegiatan Penyusunan Naskah dan Materi Pidato	86,825,500	86,226,400	99.31%	Tersusunnya naskah pidato Walikota Jambi dan buku kumpulan naskah pidato Walikota Jambi Tahun 2012 serta buku HUT Kota	Tersedianya naskah pidato Walikota Jambi dan buku kumpulan naskah pidato Walikota Jambi Tahun 2012 serta buku HUT Kota	
5	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	112,675,000	112,213,000	99.59%	Terlaksananya Musrenbangda dan tersedianya buku RKPD	Meningkatnya peran serta stakeholder & masyarakat dalam perencanaan	
6	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Anggaran Pemerintah Daerah	226,895,000	200,892,830	88.54%	Tersedianya buku rancangan dan buku penetapan	Terlaksananya proses penetapan Kebijakan dan Anggaran Pemerintah Daerah	
7	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum	95,653,100	75,317,250	78.74%	Terlaksananya rakor urusan pemerintahan umum Keikut sertaan dalam raker Apeksi Komwil II se Sumbagsel dan Rakernas APEKSI	Terciptanya koordinasi urusan pemerintahan umum	
8	Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	131,375,000	73,832,750	56.20%	Terlaksananya rapat koordinasi penelitian dan pengembangan Terbentuknya kelompok kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kota Jambi	Adanya penelitian dan pengembangan serta sistem inovasi daerah Kota Jambi	Tidak tercapainya target realisasi keuangan sebesar 19,06% merupakan efisiensi dari biaya perjalanan dinas, makan dan minum rapat
9	Kegiatan Penyusunan SIPP	165,000,000	151,899,000	92.06%	Tersusunnya buku petunjuk penggunaan aplikasi Simpeda serta aplikasi Simpeda	Menciptakan penyusunan perencanaan berbasis sistem informasi	Masih sedikit pihak ke tiga yang memiliki pengalaman kegiatan di bidang IT

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)	18,785,750	16,212,100	86.30%	Tersedianya buku analisa standar belanja sebagai pedoman untuk menyusun pagu anggaran kegiatan SKPD di Kota Jambi	Proses perencanaan yang memiliki analisa standar barang	
11	Kegiatan Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Jambi	78,575,000	53,588,150	68.20%	Tersedianya informasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD pengampu SPM Kota Jambi	Evaluasi kinerja SKPD berdasarkan SPM masing-masing	Tidak tercapainya target realisasi keuangan sebesar 27,38% merupakan efisiensi dari biaya lembur, makan dan minum dan perjalanan dinas.
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI						Sulitnya mengumpulkan capaian SPM oleh SKPD dikarenakan beberapa SKPD tidak mengetahui adanya SPM yang telah dikeluarkan oleh kementerian masing-masing. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh kementerian terkait dan kurangnya inisiatif aparat pada SKPD bersangkutan untuk mencari informasi, sehingga kegiatan SKPD banyak yang belum mengacu kepada SPM
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi	561,810,000	527,483,400	93.89%	Terlaksananya Rakor Bidang Ekonomi, RKPMD, Forum Pengembangan Ekonomi Daerah, Forum Inflasi daerah Kota Jambi Tahun 2013		
					Tersusunnya Buku PDRB Kota Jambi dan Buku Indikator Ekonomi 2013		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Kegiatan Koordinasi Pertanian dan Ketahanan Pangan	87,911,700	66,575,530	75.73%	Terlaksananya Rapat tentang pengembangan pertanian dan Ketahanan Pangan,		
					Terlaksananya Kunjungan Lapangan untuk mengambil Data Primer dan Sekunder tentang Pertanian, Perikanan, Peternakan & Kehutanan		
					Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat mengenai pengelolaan Anggaran bidang Pertanian & Ketahanan pangan		
3	Kegiatan Koordinasi Promosi Produk Unggulan Daerah	88,926,700	74,013,700	83.23%	Terlaksananya Rapat tim koordinasi promosi produk unggulan daerah		
					Terlaksananya Pembuatan Kalender dan Tas Souvenir Peluang dan Potensi Ekonomi Kota Jambi		
4	Kegiatan Studi Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi	205,402,500	197,720,450	96.26%	Tersusunnya buku hasil studi potensi PAD Kota Jambi tahun 2013.		
6	PROGRAM PERENCANAAN						
	SOSIAL BUDAYA						
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	304,860,000	271,416,850	89.03%	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Jambi		
2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan SDM	107,200,000	96,565,760	90.08%	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan SDM		
3	Kegiatan Koordinasi Program SAMISAKE	132,020,000	130,977,000	99.21%	Terlaksananya Koordinasi Program SAMISAKE		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM						
	1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Fispra	198,849,850	177,036,000	89.03%	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Fispra dan SDA Kota Jambi		Masih ada beberapa SKPD mitra yang belum mencapai target sasaran sesuai indikator RPJMD 2008 – 2013.
					Terlaksananya Koordinasi ditingkat Provinsi dan tingkat pusat (Bappenas, Kementerian PU, Depdagri, Kemenpera dan Kamenhub) dalam hal upaya untuk mendapat informasi segala berhubungan dengan perencanaan, anggaran dan segala sesuatu yang berkaitan dengan program kegiatan bidang fisik, prasarana dan SDA bappeda Kota Jambi.		Meningkatnya kerusakan jalan belum sebanding dengan penanganan yang dilakukan.
					Terlaksananya koordinasi dengan Dinas / instansi terkait untuk usulan dan pemecahan masalah yang terkait perencanaan.		Masih banyaknya SKPD yang merencanakan kegiatan yang tidak terlalu prioritas dan belum sesuai arahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing Bidang dan sub bidang.
8	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG						
	1 Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	146,020,800	104,302,650	71.43%	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Kota Jambi terkait pengendalian pemanfaatan ruang kota Jambi.		Didalam pelaksanaan penataan ruang baik dalam pemanfaatan maupun didalam upaya

						Terlaksananya koordinasi dengan Dinas / instansi terkait untuk usulan dan pemecahan masalah yang terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang kota Jambi.			Terlaksananya evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD setiap tiga bulan sekali (triwulan).							pengendaliannya masih belum maksimal sebagai akibat Ranperda RTRW Kota Jambi masih dalam tahap pembahasan yang disebabkan oleh adanya regulasi peraturan perundangan-undangan UU 26 Tahun 2007 serta PP No. 26 Tahun 2008 yang mengharuskan kabupaten / kota menyesuaikan (revisi) RTRW nya	
									Pembentukan Tim Teknis Koordinasi dan Evaluasi RT/RW Kota Jambi;	80.84%		194,256,800	240,297,850	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Materi Teknis RT/RW dan Ranperda	2		Secara prinsip kegiatan ini tidak menemui permasalahan yang berarti (dalam substansi materi), namun birokrasi penyusunan RTRW mengalami hambatan sebagai akibat terlambatnya penyusunan RTRW Provinsi yang berakibat belum keluarnya persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum sebagai leading sektor penyusunan RTRWN
									Terlaksananya Jasa konsultan perorangan selama 4 (empat) bulan dengan kualifikasi keahlian planologi sebanyak 1 (satu) orang, dan Jasa praktisi hukum (akademisi) sebagai nara sumber sebanyak 1 (satu) orang.								
									Terlaksananya Cetak dan penggandaan Peta dan Ranperda Kota Jambi.								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi

Bappeda Kota Jambi sebagai lembaga teknis perencanaan, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state).

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu:

1. Pasal 10, ayat (2): "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah";
2. Pasal 11, ayat (3): "Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah";
3. Pasal 12, ayat (2): "Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah";
4. Pasal 14, ayat (2): "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah".
5. Pasal 15, ayat (4): "Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD";
6. Pasal 16, ayat (4): "Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah";

7. Pasal 18, ayat (2): "Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah".
8. Pasal 20, ayat (2): "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah";
9. Pasal 21, ayat (4): "Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD";
10. Pasal 22, ayat (4): "Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD";
11. Pasal 24, ayat (2): "Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang";
12. Pasal 28, ayat (2): "Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD"; 13. Pasal 29, ayat (3): "Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD"

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor.19 Tahun 2009, Bappeda Kota Jambi didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Berikut ini Tabel 2.3 mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana StrategisSKPD dan Indikator Kinerja kunci :

Tabel 2.3 Pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja

NO	INDIKATOR SASARAN	TAR-GET SPM	TAR-GET IKK	IKU	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE PADA TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE (%)					PROYEKSI (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;			42	9	8	8	8	9	100	100				100	100	100	100	100
2	Tersedianya kajian dan Dokumen teknis			96	17	17	13	16	16	100	100				100	100	100	100	100
3	Terlaksananya koordinasi terhadap lembaga daerah dan pusat	65			65	65	65	65	65	100	100				100	100	100	100	100
4	Terlaksananya rakor, musyawarah, FGD dan lain-lain	320			50	60	65	70	75	100	100				100	100	100	100	100
5	Tersedianya 18 aplikasi sistem informasi			18	1	2	3	5	7	100	100				100	100	100	100	100

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kota Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kota Jambi. Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kota Jambi Tahun 2013-2018. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Kota Jambi dirumuskan melalui Renstra Bappeda Kota Jambi yang tidak terlepas dari Renstra Kota Jambi. Adapun strategi Bappeda Kota Jambi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
5. Membangun, memanfaatkan dan menginduksi Sistem Informasi dalam rangka optimalisasi perencanaan pembangunan daerah ;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, menetapkan prioritas pembangunan pada Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Jambi Tahun 2015

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SKPD
1	Percepatan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur	1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong gorong 3. Pembangunan dan pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan 4. Pengendalian dan pemanfaatan ruang 5. Pengendalian pemanfaatan ruang 6. Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan 7. Peningkatan kualitas lingkungan berbasis kawasan 8. Peningkatan mutu dan perluasan kapasitas pelayanan perparkiran 9. Peningkatan pengelolaan dan keselamatan perhubungan 10. Perencanaan tata ruang	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan 2. Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan 3. Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan budaya dan pariwisata 4. Pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat 6. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan	
3	Percepatan dan perluasan pengembangan Ekonomi dan investasi	1. Pengembangan sentra sentra perdagangan dan industri 2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 3. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 4. Peningkatan kemampuan teknologi industri 5. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan petani 6. Peningkatan kualitas kelembagaan petani 7. Peningkatan pelayanan pengelola perpasaran 8. Peningkatan produksi, mutu, produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	
4	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2. Pemanfaatan kecamatan dan kelurahan 3. Pembinaan dan pemeliharaan perlindungan masyarakat 4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas bagi orkemas dan parpol 6. Pemeliharaan dan penyelenggaraan tramtibum, serta penegakkan regulasi daerah 7. Penataan peraturan Per Undang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah 8. Peningkatan dan pengelolaan pendapatan	

		daerah 9. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah 10. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah 11. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12. Peningkatan Kerjasama Daerah 13. Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik 14. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan 15. Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD 16. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan 17. Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 18. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan 19. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 20. Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan 21. Pelayanan administrasi perkantoran 22. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23. Peningkatan disiplin aparatur 24. Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur 25. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26. Rancangan SKPD 27. Pengembangan Data dan Informasi	
5	Peningkatan Kualitas lingkungan Hidup	1. Peningkatan pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang publik dan keanekaragaman hayati 2. Peningkatan pengelolaan persampahan 3. Penurunan beban pencemaran	
6	Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial	1. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 2. Koordinasi keagamaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan PMKS 5. Peningkatan kesetaraan gender dan perempuan dan perlindungan anak 6. Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja	

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.

Tabel 2.5
Keterkaitan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2015
Dengan Prioritas RKPD Kota Jambi

No	Kegiatan Bappeda	Prioritas Ranwal RKPD
1	Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi	Percepatan dan perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi
2	Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang Sosbud dan pemerintahan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial;
3	Perencanaan, koordinasi dan survei perhubungan dan penataan ruang, pertanahan, SDH dan LH	Peningkatan Kualitas lingkungan hidup
4	Perencanaan, koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur pemukiman dan sanitasi kawasan perkotaan	Percepatan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
5	Penyusunan dan Koordinasi kajian kelitbangan dan sistem inovasi daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah	
7	Pengembangan Data/Informasi	
8	Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list ke working plan*. Dimana

satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kota Jambi yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda

Berdasarkan visi dan misi Bappeda Kota Jambi, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dirumuskan dalam 4 misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas;

Tujuan:

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran:

Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah kota Jambi

Misi 2 : Merumuskan Dokumen Perencanaan dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan;

Tujuan:

Meningkatkan keterlibatan peran seluruh *stakeholder* dalam proses penyusunan perencanaan daerah;

Sasaran:

Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

Misi 3 : Meningkatkan keterlibatan peran seluruh stakeholder dalam proses penyusunan perencanaan daerah;

Tujuan:

Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

Sasaran:

Menghasilkan sinergisitas lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah serta menghasilkan sinergisitas lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah;

Misi 4 : Mengembangkan informasi dan teknologi dalam proses perencanaan untuk meningkatkan kehandalan, akuntabilitas dan transparansi;

Tujuan:

Membangun, memanfaatkan dan menginduksi Sistem Informasi dalam rangka optimalisasi perencanaan pembangunan daerah;

Sasaran:

Menghasilkan aplikasi yang interaktif yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah;

3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2015

Pada Tahun 2015, Bappeda Kota Jambi akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data/Informasi

- Pengembangan Data dan Informasi

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Penyusunan dokumen Perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, JUA PPAS)
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah
- Penyusunan dan Koordinasi Kajian kelitbangan dan sistem inovasi daerah
- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi
- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang sosobud

3. Program Perencanaan Tata ruang

- Perencanaan koordinasi dan survei perhubungan dan penataan ruang, pertanahan SDH dan LH
- Perencanaan, Koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur pemukiman dan sanitasi kawasan perkotaan

Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2015, namun tidak masuk di dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakhti dan penjaga malam

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pengadaan peralatan perkantoran
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6. Program Perencanaan SKPD

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016
Bappeda Kota Jambi

PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran							
1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan teradministrasinya serta terkirimnya surat keluar	Bappeda Kota Jambi	2000 surat	6,930,000	APBD		2000 surat	6,930,000
2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	187,000,000	APBD		1 Tahun	187,000,000
3 Kegiatan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan dan barang/jasa yang tertib dan baik	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	250,000,000	APBD		1 Tahun	193.848.000
4 Kegiatan Jasa kebersihan kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	110,000,000	APBD		1 Tahun	110.000.000

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	45,137,250	APBD		1 Tahun	60.076.500
6	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Administrasi Kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 Tahun	55.000.000
7	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	85,000,000	APBD		1 Tahun	70.000.000
8	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar, koran nasional, koran internasional, dan majalah	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	18,000,000	APBD		1 Tahun	22.000.000
9	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	87,600,000	APBD		1 Tahun	93.500.000
10	Perjalanan Dinas	Terwakilinya Bappeda Kota Jambi dalam pelaksanaan perjalanan dinas guna koordinasi, konsultasi dan urusan tugas lainnya	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	736,800,000	APBD		1 Tahun	780.000.000
11	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Tersedianya Pengemudi dan tenaga kontrak administrasi	Bappeda Kota Jambi	7 Org	66,000,000	APBD		7 Org	184.800.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur							
1 Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gudang Arsip Kantor (lanjutan)	Bappeda Kota Jambi	1 Unit	197,110,000	APBD		1 Unit	-
2 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	61,750,000	APBD		1 Tahun	200,000,000
3 Kegiatan Pengadaan mebel	Terlaksananya pengadaan mebel kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Paket	85,000,000	APBD		1 Paket	175,500,000
4 Kegiatan Pengadaan peralatan perkantoran	Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang kegiatan kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	484,800,000	APBD		1 Tahun	55,000,000
5 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan taman kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	37,500,000	APBD		1 Tahun	35,000,000
6 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya BBM, Suku Cadang dan ServiceKendaraan Dinas/Operasional dan Terbayarnya PajakKendaraan Dinas/Operasional	Bappeda Kota Jambi	8 Mobil dan 16 Motor	260,320,000	APBD		8 Mobil dan 16 Motor	250,000,000
7 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan alat-alat kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	111,500,000	APBD		1 Tahun	65,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi Kantor dan Taman Kantor Bappeda Kota Jambi	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	661,516,250	APBD		1 Tahun	675,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal							
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya (PDH dan PSR)	Bappeda Kota Jambi	60 stel	37,700,000	APBD		60 stel	48,500,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas							
1 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	68,000,000	APBD		1 Tahun	65,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kesesuaian laporan capain kinerja dan keuangan							
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya informasi tentang kondisi dan kinerja pelaksanaan kegiatan di Bappeda Kota Jambi	Bappeda Kota Jambi	10 buku	5,000,000	APBD		10 buku	20,000,000
Program Perencanaan SKPD	Meningkatnya kesesuaian rencana kerja SKPD							
1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Buku Renja dan Tapkin Bappeda 2016	Bappeda Kota Jambi	15 buku	15,000,000	APBD		15 buku	15,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya efektivitas perencanaan yang baik				APBD			
1 Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Sistem Informasi Perencanaan	Bappeda Kota Jambi	-	387,985,000	APBD	-	-	170,000,000
	Tersedianya aplikasi sistem informasi		1 apls			6 apls	1 apls	
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Meningkatnya kesesuaian antara pemanfaatan dan rencana ruang		100%					
Perencanaan, Koordinasi dan Survei Perhubungan dan Penataan Ruang, Pertanahan, SDA dan LH	Terlaksananya Rakor/FGD/Konsultasi Publik/Bidang Perhubungan dan Penataan ruang	Bappeda Kota Jambi	12 kali	225,000,000	APBD	68 kali	12 kali	297,000,000
	Tersusunnya Kajian/dokumen penataan ruang		0			6 dok	2 dok	
	Tersedianya aplikasi sistem informasi		0			2 apls	1 apls	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan	Terlaksananya Rakor/FGD/Konsultasi Publikr Bidang Infrastruktur pemukiman dan kawasan	Bappeda Kota Jambi	12 kali	640,000,000	APBD	66 kali	12 kali	275,500,000
2	Infrastruktur Permukiman dan Sanitasi Kawasan Perkotaan							
	Tersusunnya Kajian/dokumen Infrastruktur pemukiman dan kawasan		4 dok			15 dok	1 dok	
	Tersedianya aplikasi sistem informasi		0			2 apls	0	
	Meningkatnya keserasian antara perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan							
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN								
Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	3	Kota Jambi	2 kali	1,500,000,000		10 kali	2 kali	1,300,000,000
	Terlaksananya Musyawarah							
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		8 dok			39 dok	8 dok	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah	4	Kota Jambi	2 dok	310,000,000	APBD	10 dok	2 dok	289,500,000
	Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah							
	Terlaksananya rakor/konsultasi publik		4 kali			20 kali	4 kali	
	Tersusunnya Laporan DAK		4 dok			20 dok	4 dok	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tersedianya aplikasi sistem informasi		0			2 apls	0	
5	Penyusunan dan kordinasi kajian kelitbangan dan sistem inovasi daerah	Bappeda Kota Jambi	12 kali	635,000,000	APBD	58 kali	12 kali	560,000,000
	Tersusunnya Kajian/dokumen Perencanaan Bidang Kelitbangan		5 dok			24 dok	4 dok	
6	Perencanaan, Kordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi	Bappeda Kota Jambi	19 kali	580,500,000	APBD	70 kali	13 kali	810,000,000
	Tersusunnya Kajian/dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		2 dok			16 dok	4 dok	
	Tersedianya aplikasi sistem informasi		0			2 apls	0	
7	Perencanaan, kordinasi dan supervisi pembangunan bidang Sosbud dan Pemerintahan	Bappeda Kota Jambi	15 kali	1,136,500,000	APBD	66 kali	14 kali	810,000,000
	Tersusunnya Kajian/dokumen Perencanaan Bidang Sosbud dan Pemerintahan		6 dok			20 dok	2 dok	
	Tersedianya aplikasi sistem informasi		1 apls			4 apls	1 apls	

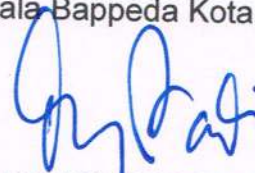
BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-2018, berdasarkan RPJMD Kota Jambi 2013-2018, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk mencapai target kinerja yang belum terpenuhi. Target kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja Perencanaan Daerah dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Daerah.

Indikator Kinerja perencanaan pembangunan daerah adalah :

1. Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Jambi, yang ditandai dengan Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Menghasilkan pengkajian dan dokumen perencanaan teknis yang handal yang ditandai dengan Tersedianya kajian dan Dokumen teknis untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pembangunan dan pencapaian tujuan dan sasaran daerah.
3. Menghasilkan aplikasi yang interaktif yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah dengan menyusun aplikasi berbasis IT dalam mendukung pengelolaan perencanaan yang lebih efisien.

Jambi, Desember 2014
Kepala Bappeda Kota Jambi



DR. DONNY ISKANDAR, S.Sos, MT.
PEMBINA TK.I
NIP.19691125 199703 1 004